SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 151 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NAGREG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2014 Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 147 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran *(output)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II
PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
e. Penutup; dan

f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

(1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
(2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
    a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
    b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
    c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

(1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
(2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
(3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
(4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV
PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
(3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 03 Juli 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 03 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 151

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 151 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NAGREG KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN NAGREG
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

Pemerintah
Kabupaten Bandung

BUPATI BANDUNG

PERATURAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025

KECAMATAN NAGREG
KABUPATEN BANDUNG

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja merupakan suatu dokumen perencanaan untuk satu tahun yang memuat kebijakan program, Kegiatan, dan subkegiatan pembangunan yang disertai target capaian dan indikator sasaran, kegiatan dan subkegiatan yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis.

Bahwa Perencananan merupakan suatu proses dinamis yang harus disesuaikan dengan sumber daya organisasi sebagai konsekuensi logis dari perubahan lingkungan organisasi, artinya, guna mempertegas arah kebijakan pemerintah Kecamatan Nagreg sebagai upaya mengantisipasi kebutuhan dan upaya penyelerasan arah pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahunan dan rencana tahunan guna mendukung dan menjalankan Visi dan Misi kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026

Dalam realisasinya Rencana Kerja Kecamatan disertai dengan dinamika yang menuntut adanta penyesuaian terhadap kebutuhan pada tahun berjalan, sehingga Rencana Kerja perlu dilakukan perubahan sebagai konsekuensi terhadap adanya pengurangan atau panambahan Kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggarannya, dan untuk menyikapi dinamika tersebut rencana perlu dilakukan perubahan terhadap Kerja perubahan tahun 2025

Semoga Rencana Kerja Perubahan ini berguna bagi Kecamatan Nagreg dan dapat mendukung terhadap kinerja pembangunan di Kabupaten bandung dan semoga pula apa yang direncanakan sesuai dengan realita yang ada dan mampu berkontribusi terhadap capaian target indikator Utama di Kabupaten bandung.

Nagreg, Juni 2025
Camat Nagreg

DINDIN HIKMAT WAHIDIN, S.E,.M.K.P
NIP. 19700205 199003 1 004

KATA PENGANTAR	.....	**1**
DAFTAR ISI	.....	**2**
BAB I	**PENDAHULUAN**	**3**
	1.1 Latar Belakang	**3**
	2.1 Landasan Hukum	**5**
	3.1 Maksud dan Tujuan	**6**
	4.1 Sistematika Penulisan	**6**
BAB II	**HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU**	**8**
	2.1 Hasil Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	**8**
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat daerah	**23**
	2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	**26**
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	**29**
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	**49**
BAB III	**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**	**51**
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	**51**
	3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	**54**
	3.3 Program Kegiatan	**56**
BAB IV	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**75**
BAB V	**PENUTUP**	**81**

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, bahwa Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum., sebagai pelaksana perangkat daerah kabupaten/kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan bupati/wali kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di kabupaten/kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumber daya manusia, dan sumber pembiayaannya.

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati/wali kota kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan dan fungsinya sevagai Perangkat Daerah, Kecamatan dituntut untuk dapat meningkatkan Pelayanan terhadap masyarakat, dan dengan pelayanan tersebut Kecamatan merupakan etalase yang mencerminkan Pelayanan Daerah Kabupaten, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan harus memiliki Perencanaan dan target kinerja yang jelas dan terukur.

Dalam pasal 15 ayat (1) disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah, Kecamatan Nagreg sesuai dengan Renstra Tahun 2021-2026 telah meiliki Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama yang setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nagreg dengan memperhatikan Tujuan, Sasaran, dan Indikator yang tercantum didalam Renstra dimaksud.

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nagreg Tahun 2024 sebagai bagian dari Rencana Strategis Tahun 2021-2026 merupakan hasil dari Koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan BAPERLITBANGDA untuk mencapai tujuan dan target sesuai dengan target Renstra yang merupakan bagian dari Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021- 2026.

Kecamatan Nagreg sebagai Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam berkontribusi terhadap capaian Daerah dengan Visi Kabupaten Bandung “ Terwujudnya Masyarakat Kabupaten bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera” dengan Misi Nomor 4 Mengoptimalkan tata kelola

pemerintahan melalui Birokrasi yang profesional, dan Tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai – nilai keagamaan,

Sebagai bagian dari Perencanaan, Rancangan Rencana KerjaKecamatan Nagreg Tahun 2024 disusun berdasarkan kebutuhan yang berdasarkan permasalahan yang ada dan perlu penanganan sehingga pelayanan terhadap masyarakat menjadi optimal dan mendukung terhadap tugas Atributif yang diemban kecamatan serta dalam rangka menjalankan pelimpahan sebagian urusan pemerintah dari Bupati kepada camat

Penyelenggaraan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diharapkan dalam penyelengaraan Pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dapat mendorong terhadap capaian kinerja yang optimal dengan memberikan kontribusi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten,

Bahwa sesuai dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep. 580 - Adpem/2018 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada Camat, terdapat 29 Bidang Pelimpahan, 23 sub bidang Pelimpahan, dan 321 Rincian Pelimpahan dengan Pelimpahan berupa Pelaksanaan, Koordinasi, Rekomendasi, Pembinaan, dan Fasilitasi (Perizinan dan Non Perizinan)

Dalam rangka memberikan acuan terhadap pengukuran kinerja guna memberikan gambaran terhadap capaian Kinerja, Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) merupakan Dokumen Penting dan strategis dan merupakan proses perencanaan sehingga menjadi variabel yang sangat strategis dalam perencanaan, disamping itu, isu strategis dan potensi yang ada sangat diperhatikan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun 2024

Peyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Nagreg Tahun 2023 disusun berdasarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan serta Target yang akan dicapai, sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis dan juga menyeleraskan dengan dokumen perencanaan Kabupaten Bandung (RPJMD dan RKPD) sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Bahwa rencana Kerja Tahunan Kecamatan Nageg dalam dinamika pelasanaannya terdapat hal yang perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan pada Tahun Anggaran perubahan sehingga diperlukan adanya perubahan Rencana Kerja sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Tahun 2015 Nomor 2037);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016

Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 147 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026;
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 83);
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 76);
28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung 2023 Nomor 120);
29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);
30. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Bandung nomor 137/Kep.862-TAPEM.2023 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/Kep.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Disusunnya Rencana Kerja (Renja) dimaksudkan untuk :

1. Menyusun Dokumen Perencanaan Tahun 2025

2. Sebagai pedoman dan arah meiaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Prioritas Kabupaten Bandung
3. Sebagai tolok ukur dalam pencapaian strategi dan kebijakan umum pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Nagreg

1.4. Mekanisme Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Menguraiakan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Kecamatan Nagreg, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapt dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Memuat tentang Renja Kecamatan Nagreg, proses penyusunan Renja KecamatanNagreg, keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD, Renstra dengan Renja

1.2. Landasan Hukum

Menguraikan apa yang menjadi landasan hukum di dalam penyusunan Renja Kecamatan Nagreg Tahun 2025

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Nagreg

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Nagreg serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Nagreg Tahun lalu (tahun-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1)

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Nagreg

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nagreg

2.3 Isu-Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nagreg

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Menjelaskan yang menyangkut arah dan kebijakan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nagreg

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Nagreg Menjelaskan mengenai tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nagreg

3.3 Program dan Kegiatan

Menjelaskan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN NAGREG TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Kecamatan Nagreg

Evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek berdasarkan acuan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, evaluasi terhadap Pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya adalah Tahun 2023 dikarenakan pada saat penyusunan Renja Tahun 2024, tahun berjalan adalah Tahun 2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2023 dimaksudkan untuk menilai sekaligus menganalisa pelaksanaan program maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Nagreg. Evaluasi ini meliputi evaluasi kinerja Renja Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Kecamatan Nagreg Tahun 2016-2021.

Dari evaluasi ini dapat diketahui secara langsung capaian kinerja program dan kegiatan sampai dengan tahun ke-lima pelaksanaan Renstra 2021-2026. Dengan demikian, dapat dilihat faktor-faktor pendorong keberhasilan dan faktor kendala yang terjadi selama melaksanakan program dan kegiatan yang telah tersusun padatahun 2025.

Secara umum Kecamatan Nagreg telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 sebanyak 3 (tiga) sasaran. Tahun 2025 adalah tahun ke-tiga pelaksanaan Rencana Strategis Kecamatan. dari 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran) yang sejkaligus sebagai Perjanjian Kinerja pada Tahun 2025.

Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun 2023 berjalan ditengah pemulihan pandemi Covid – 19 sehingga terjadi adanya kebijakan refocusing terhadap pagu anggaran, dan dari Refiocing tersebut berdampak terhadap adanya pengurangan anggaran dan selain terdapat adanya beberakali perubahan yang berdampak terhadap tidak tercapainya realisasi target anggaran.

Dengan adanya kebijakan refocusing tersebut Camat Nagreg telah melakuka langkah – langkah diantaranya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi berdasarkan Tugas dan fungsi yang melekat sesuai Perbup No 99 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Bandung, adapun Capaian Pelaksanaan Renja Tahun 2022 (Tahun Lalu) dan Capaian Renstra sebagaimana tabel berikut

Tabel 2.1 (TC 29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat DaerahTahun 2024 s/d Triwulan I TA 2025
Kecamatan Nagreg

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (*outcome*) / Kegiatan (*output*)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025		
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)
7.01.0.00.0.00.17.0000	**Kecamatan Nagreg**										
07.01	**Kecamatan**										
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akip**	**79 Poin**	**75 Poin**	**76 Poin**	**77 Poin**	**101%**	**78 Poin**	**0 Poin**	**77 Poin**	**98%**
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**300%**	**100%**	100%	100%	**100%**		400%	100%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15 Dokumen	12 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	13 Dokumen	87%
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	100%

7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Dokumen	4 Dokumen	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	5 Dokumen	100%
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Laporan	0 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	0 Laporan	0 Laporan	0%
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**300%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**400%**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tujangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/bln	28 Org/bln	26 Org/bln	26 Org/bln	100%	26 Org/bln	26 Org/bln	26 Org/bln	100%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	5 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	100%

7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15 Laporan	12 Laporan	-	0 Laporan	-	1 Laporan	0 Laporan	12 Laporan	80%
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5 Dokumen	3 Dokumen	-	0 Dokumen	-	1 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	60%
7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**300%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	100%	100%
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	296 Orang	148 Orang	37 Orang	37 Orang	100%	37 Orang	0 Orang	185 Orang	63%
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	100%	100%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0 Paket	4 Paket	80%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	85 Paket	63 Paket	21 Paket	21 Paket	100%	21 Paket	0 Paket	84,00	99%
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0 Paket	4 Paket	80%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket	6 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	10 Paket	0 Paket	8 Paket	80%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	16 Paket	4 Paket	4 Paket	100%	4 Paket	0 Paket	20 Paket	83%

7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65 Dokumen	52 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	13 Dokumen	0 Dokumen	55 Dokumen	85%
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Dokumen	3 Dokumen	-	0 Dokumen	-	3 Dokumen	0 Dokumen	3 Dokumen	100%
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	83%
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	100%	100%
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	0 Paket	4 Paket	80%
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	12 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	1 Paket	0 Paket	19 Paket	90%
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**300%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	100%	100%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah**	**100%**	**300%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	100%	100%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	0 Unit	5 Unit	100%

7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Peralatan	4 Peralatan	2 Peralatan	2 Peralatan	100%	7 Peralatan	0 Peralatan	2 Peralatan	50%
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	2 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%	1 Gedung	0 Gedung	3 Gedung	75%
07.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	90 Poin	90 Poin	90 Poin	90 Poin	101%	**90 Poin**	**0 Poin**	90 Poin	100%
7.01.02.2.03	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**100%**	**300%**	100%	100%	100%	**100%**	**0%**	100%	100%
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Laporan	4 Laporan	1 Laporan	1 Dokumen	100%	1 Laporan	0 Laporan	5 Laporan	100%
7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	100%	100%
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
07.01.03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	100%	100%
7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	100%	100%
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 LK	5 LK	5 LK	5 LK	100%	100%	0 LK	10 LK	200%

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	100%	100%
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 LK	3 LK	1 LK	1 LK	100%	1 LK	0 LK	4 LK	80%
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 LK	3 LK	1 LK	1 LK	100%	1 LK	0 LK	4 LK	80%
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	5 Laporan	4 Laporan		0 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.03.2.06	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**100%**	**100%**	-	100%	-	**100%**	**0%**	100%	100%
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%

7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	0 Keluarga	-	0 Keluarga	-	50 Keluarga	0 Keluarga	0 Keluarga	0%
07.01.04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	100%	100%
7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	100%	100%
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%
7.01.04.2.02	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	200%	200%
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2 Laporan	0 Laporan	4 Laporan	80%

07.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	100%
7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	100%
7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	650 Orang	450 Orang	150 Orang	150 Orang	100%	150 Orang	0 Orang	600 Orang	92%
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 LK	0 Dokumen	4 Dokumen	80%
07.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	100%
7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**0%**	**100%**	100%
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	-	-							
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10 Dokumen	6 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	0 Dokumen	7 Dokumen	70%

7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa									
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa									
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	4 Dokumen	80%

Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Realisasi Program yang menunjang terhadap kinerja utama dari Tabel 2.1 di atas memberikan gambaran :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

   Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja terdapat beberapa Program diantaranya :

   a. Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota 99,00%

   b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

   Meskipun secara pembiayaan dengan Realiasi Program tersebut tidak tercapai, namun dalam pelaksanaan tugas fungsi yang melekat, program tersebut dapat dilaksanakan dan mencapai Kinerja yang sesuai dengan target.

   Yang paling menonjol terhadap capaian Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang hanya mencapai 78,50%, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya perubahan Anggaran akibat dari adanya perubahan APBD TA 2021 yang berakibat terhadap keterlambatan openyerapan, namun demikian meskipun berpengaruh terhadap capaian pelaksanaan program namun secara umum capaian Kinerja masih tetap tercapai meskipun ada kegiatan yang sama sekali tidak dilaksanakan.

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

   Dari sisi penyerapan anggaran Secara keseluiruha mencapai 92%, realisasi Program Kegiatan/Sub Kegiatan telah berjalan sesuai perencanaan dan telah sesuai target program dan Kegaiatan (Outcome) maupun Kegiatan sesuai dengan target dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam perencanaan meskipun dalam penggunaan atau penyerapan anggaran terdapat kegiatan yang penyerapannya hanya 50 persen namun dalam capaian kinerjanya mencapai 100% , hal tersebut dikarenakan pada anggaran tersebut kegiatanya sebagian dilaksanakan dikarenakan adanya pandemi Covid - 19 sehingga anggaran yang ada tidak terserap 100%..

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nagreg

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nagreg Pengukuran Kinerja Sasaran dan Pengukuran Kinerja Kegiatan dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), Indikator – indikator tersebut merupakan Target dari Capaian Indikator sasaran dan Kegiatan. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas target Capaian dan hasil pengukuran kinerja, Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Nagreg sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksankan.

Indikator adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukannya pengukuran terhadap perubahan – perubahan yang terjadi, sehingga dari Indikator tersebut dapat diukur sejauhmana capaan Kinerja dalam pelaksanaan Program maupun Kegiatan.

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan, tingkat kesesuaian dalam pelaksanaan dan perencanaan harus terjadi klesesuaian yang akan memudahkan pengukuran capaian Kinerja., sehingga Capaian Kinerja yang diperoleh dari hasil Kerja dan Kinerja Perangkat Daerah merupakan Implementasi dari sebuah perenccanaan

Analisis Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana capaian Kinerja terutama pada tahun sebelumnya untuk memberikan masukan terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun berikutnya.

Analisis Kinerja Pelayanan di Kecamatan Nagreg merupakan hasil yang objektif sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tahun sebelumnya sebagaimana tergambar pada tabel 2.2 mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Nagreg.

Tabel 2.2 (TC.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan kecamatan Nagreg
Kabupaten Bandung

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Indek Kepuasan Masyarakat			85	86	87	88	88,83	90,15	90,20	90,50	Pada TahunTahun 2021. 2022, 2023 DAN 2024 terjadi Capaian Realisasi yang melebihi target sejalan dengan optimalisasi pelayanan melalui Inovasi Nagreg Cerdas, sehingga target untuk tahun 2024 sudah tidak relevan namun demikian target masih tetap dikarenakan belumdilakukan perubahan kedua pada Renstra Tahun 2021-2026, dan untuk realisasi Tahun 2023 belum ada dikarenakan laporan IKM dilakukan pada akhir Tahun atau bulan Desember pada aplikasi e-SKM Kab Bandung
3	Nilai AKIP			72	73	74	75	75,35	77,40	78	78,50	Dengan adanya Monev Internal pelaksanaan Program kegiatan dan rencana aksi yang dilakukan tiap Triwulan, Capaian Nilai AKIP Tahun 2024 telah melampaui target Untuk Realisasi Tahun 2024 belum ada dikarenakan belum dilakasanakan Evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten bandung
4	Persentase BMD/Aset dalam Kondisi Baik			65%	70%	75%	80%	65%	75%	75%	75%	dengan adanya pendataan dan penertiban aset serta pengadaan pada Tahun 2024 Target Aset dalam keadaan baik realisasi tercapai sesuai target.
5	Desa Beradministrasi baik			100%	100%	100%	100%	NA	-	100%	100%	Capaian Kegiatan Monitoring dan evaluasi terhadap realisasi bantuan keuangan Desa serta pembinaan administrasi Desa, telah berkontribusi terhadap tercapainya realisasi target

	Desa Cepat Berkembang			N/A	N/A	4	-	N/A	4	4	4	Indikator ini merupakan perubahan dari Desa Beradministrasi baik

2.1 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

1. Kinerja Kecamatan Nagreg

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Nagreg telah berjalan sesuai dengan Perencanaan meskipun masih terdapat kekurangan, sebagai bagian dari monitoring dan Evaluasi intern telah dilaksanakan Rapat Koordinasi setiap triwulan untuk memastikan capaian Kinerja dan mengatasi atau merumuskan solusi untuk mengatasi kendala dan hambatan sebagai resiko pelaksanaan pelayanan menuju ke arah yang lebih baik.

Hal – hal kritis kaitan dengan pelayanan ;

a. Melaksanakan Kewenangan Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat Nagreg berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor : ..... yang terdiri dari 30 Kewenangan dan 320 Rincian Pelimpahan, dimana dalam pelaksanaannya kewenangan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
b. Melaksanakan Pelayanan Publik langsung terhadap Masyarakat antara lain :
    1. Perizinan
    2. Non Perizinan (Penerbitan KK, KTP dan Administrasi Kependudukan lainnya)
    3. Melaksanakan Program Kewilayan
    4. Menindaklanjuti laporan dan keluhan Masyarakat kaitan dengan Pelayanan
    5. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat. (SKM) guna menghetahui tingkat Kepuasan Masyarakat nelalui Kusioner SKM Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Camat sebagai Implementasi dari Tugas Kecamatan secara umum tidak terlepas dari adanya kendala dan Hambatan yang merupakan satu kesatuan yang perlu adanya penanganan untuk memberikan arah kebijakan yang akan diambil guna terlaksananya program kegiatan sesuai dengan target kinerja maupun target dari pagu anggarannya.

Permasalahan :

a. SDM Aparatur
b. tuntutan Masyarakat terhadap Pelayanan yang menginginkan kecepatan, ketapatan, kesesuaian biaya dan berkeadilan.
c. Tingkat Pelaksanaan Pelimpahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Belum optimal dilaksanakan.
d. masih kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pelayanan publik di Kecamatan
e. Belum optimalnya partisipasi lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan dan belum optimalnya penyerapan swadaya murni dari masyarakat;
f. belum optimalnya koordinasi di tingkat Dinas/Badan dengan Kecamatan
g. permasalahan Sampah belum terkelola dengan baik
h. jauhnya jarak pusat pelayanan di Kabupaten dengan Kecamatan Nagreg
i. adanya kegiatan Galin C quari tanah

j. belum adanya sarana dan prasarana umum untuk kegiatan aktivitas warga (Olah Raga, Refressing dan kegiatan lainya) berupa Taman alun – alun
k. belum adanya pasar Tradisional dan sehat

Hambatan :

a. Sarana dan Prasarana (perlu perbaikan dan penambahan)
b. Standar Oprerasioanl Prosedur (SOP) yang berlum tersusun secara benar dan belum teraplikasinya pada seluruh bidang kegiatan.

3. **Dampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah**.

Adanya permasalahan dan hambatan yang ada terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sangat berpengaruh meskipun permasalahan dan hambatan tersebut bisa diatasi dengan melakukan monitoring dan evaluasi intern secara terus menerus dan rutin dilaksanakan setiap bulan dan apabila ada permasalahan dan hambatan, semua aparatur untuk turut membantu dan memberikan pendampingan terhadap permasalahan yang ada, sehingga program kegiatan berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian permasalahan dan hambatan tersebut perlu penanganan

4. **Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang**.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan tidak terlepas dari adanya Kekuatan, Kelemahan tantangan dan peluang yang merupakan dinamika yang perlu disikapi untuk memperlancar pelayanan dan dikelola dengan baik agar kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan kekuatan yang dimiliki dan peluang yang ada

A. Kekuatan

1) Adanya dukungan anggaran
2) SDM Aparatur meskipun masih terdapat kelemahan tetapi secara umum dapat melayani dengan baik
3) Sarana dan Parasarana pendukung pelayanan
4) sinergitas dan soliditas aparatur

B. Kelemahan

1) Sarana dan Prasarana perlu adanya perbaikan dan pengadaan sarana dan prasarana baru
2) Kapasitas SDM Aparatur
3) Tidak adanya sarana publik yang memadai (RTH)

C. Tantangan

1) Masyarakat menginginkan adanya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat
2) Sebagian masyarakat masih belum memahami atau belum mengetahu tentang SOP pelayanan
3) Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan yang sehat dan bersih
4) Masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat dalam perencanaan (Musrenbang)

D. Peluang

1) Antusiasme masyarakat terhadap perencanaan mendukung Kegiatan Musrenbang telah berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
2) Antusiame masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan (KK, KTP, Akte Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak)
3) Kordinasi dengan pemerintah Desa masih terjalin dengan baik.

5. Formulasi isu – isu penting

Formulasi isu – isu penting sebagai tindak lanjut dari adanya permasahan, Tantangan dan peluang merupakan satu kesatuan dan satu rangkaian untuk memberikan catata strategis atau rekomendasi untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun yang direncanakan antara lain :

1) Meningkatkan Kapasitas SDM Aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada Bimtek dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemkab
2) Melaksanakan Pembinanan peningkatan kapasitas melalui Sosialisasi Perundang – undangan kaitan dengan Tugas dan Fungsi Aparatur
3) Melaksanakan Monitoring dan evaluasi capaian kinerja intern secara rutin, terus menerus dan berkesinambungan
4) Penysusunan SOP secara lengkap untuk tiap bidang dan sub bidang
5) Melaksanakan sosialisasi pelayanan publik di kecamatan terutama masalah administrasi Kependudukan
6) Meningkatkan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan urusan pemerintahan dari bupati secara terukur dan sesuai ketentuan
7) Memfasilitasi adanya pelayanan terpadu yang melayani Pembuatan KTP, KK, Perizinan, Perpustakaan dan pelayan terpadu tersebut Dinas terkait yang memberikan layanan publik hadir langsung melayani di Kecamatan

2.2 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Perbandingan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan

Membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana awal Rencana Kerja Tahun yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan.

Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.

Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan rancangan awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan,

Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara rancangan awal RKPDl dengan hasil analisis kebutuhan, hal tersebut

2. Alasan Pelaksanaan analisis kebutuhan

Untuk menjamin agar perencanaan sesuai dengan permasalahan yang ada maka perlu dilakukannya analisis kebutuhan dari berbagai bidang secara keseluruhan disesuaikan dengan kemampuan keuangan sebagaimana pagu yang telah ada. Harapannya tentu dalam pelaksanaannya tidak terjadi pengadaan atau pelaksanaan kegiatan diluar kebutuhan

Review Terhadap RKPD tahun 2025
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung

No	RKPD Murni					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	kebutuhan Dana (Rp)	
	KECAMATAN					**KECAMATAN**					
	KECAMATAN NAGREG				**5.832.612.570,56**	**KECAMATAN NAGREG**				**5.599.812.768**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Nagreg	**Nilai Akip**	**73**	**5.832.612.570,56**	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Nagreg	**Nilai Akip**	**78**	**4.724.259.392**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	**Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**67.000.000,00**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Kec.Nagreg	**Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**11.000.000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	**25.000.000,00**	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	5.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	3.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.000.000	

	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	4.000.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Laporan	1.000.000	
	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec.Nagreg	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Laporan	4.000.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec.Nagreg	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Laporan	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	**Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	4.756.685.702,56	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kec.Nagreg	**Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**4.178.332.524**	
	Penyediaan Gaji dan Tujangan	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	26 Org/Bulan	4.749.185.702,56	Penyediaan Gaji dan Tujangan	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Org/Bulan	4.178.332.524	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	2.500.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	100.000.000,00	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Kec.Nagreg	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**-**	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37 paket	100.000.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 paket		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	**Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal**	**37 Orang**	115.000.000,00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kec.Nagreg	**Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal**	38 Orang		

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	5.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	**100%**		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 paket	15.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	17 paket		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	47 paket	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	47 paket	**10.000.000**	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket	5.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 paket		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10.000.000,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec.Nagreg	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	13 paket	10.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	14 paket	**100.000.000**	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 dokumen	5.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 dokumen	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	15.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec.Nagreg	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8 Lap 167 Lap**	121.000.000,00	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kec.Nagreg	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	9 Lap 167 Lap	5.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		58.000.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	63.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	**100%**	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Nagreg	**Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Unit**	434.926.868,00	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec.Nagreg	**Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Unit	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Unit	35.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Unit		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Paket	399.926.868,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Paket	60.000.000	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec.Nagreg	**Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah**	**7 nit**	238.000.000,00	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kec.Nagreg	**Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah**	8 nit		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Nagreg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		35.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec.Nagreg	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		**35.000.000**	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	3.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	200.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec.Nagreg	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	
		Kec.Nagreg					Kec.Nagreg			10.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec.Nagreg	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	89 Poin	416.500.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Kec.Nagreg	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	90,20 Poin	25.000.000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Kec.Nagreg	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Laporan**	5.000.000,00	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Kec.Nagreg	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	Laporan	-	
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	5.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	12 laporan	-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec.Nagreg	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan**		411.500.000,00	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	Kec.Nagreg	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan**		-	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11 Laporan	411.500.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	**11 Laporan**	**369.926.868,00**	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec.Nagreg	**Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**100%**	150.000.000,00	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Kec.Nagreg	**Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa**	2		

	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Kec.Nagreg	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5 unit**	60.000.000,00	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	Kec.Nagreg	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	6 unit	20.000.000,00	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Unit	5.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Unit	-	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Unit	55.000.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Unit	349.926.868	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kec.Nagreg	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan**	**6 unit**	35.000.000,00	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	Kec.Nagreg	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan**	7 unit	60.000.000	
	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		5.000.000,00	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		20.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya		10.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec.Nagreg	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya			
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		10.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	84%	10.000.000,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	**184%**		
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kec.Nagreg	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**%**	55.000.000,00	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	Kec.Nagreg	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	%	40.000.000	
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec.Nagreg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Laporan	5.000.000,00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec.Nagreg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Laporan		

	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec.Nagreg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dokumen	10.000.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec.Nagreg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Dokumen	**4.724.259.392**	
	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec.Nagreg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	%	10.000.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec.Nagreg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	**%**		
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec.Nagreg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	10.000.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec.Nagreg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen	**210.000.000**	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec.Nagreg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Laporan	10.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec.Nagreg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Laporan	-	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec.Nagreg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Laporan	10.000.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec.Nagreg	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Laporan		
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec.Nagreg	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100%**	35.000.000,00	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Kec.Nagreg	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	200%		
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Nagreg	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**1 Dokumen**	25.000.000,00	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	Kec.Nagreg	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	2 Dokumen	-	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100%	5.000.000,00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	**100%**		

	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Dokumen	20.000.000,00	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Dokumen		
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec.Nagreg	**Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah**	**1 Laporan**	10.000.000,00	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	Kec.Nagreg	**Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah**	1 Laporan		
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 laporan	10.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec.Nagreg	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	2 laporan	**5.000.000**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec.Nagreg	**Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**		74.000.000,00	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Kec.Nagreg	**Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**		5.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec.Nagreg	**Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	74.000.000,00	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	Kec.Nagreg	**Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100%**	**205.000.000**	
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	54.000.000,00	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Nagreg	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	**100%**	3.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6 LK	20.000.000,00	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	7 LK	2.000.000	

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec.Nagreg	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**Dokumen**	51.000.000,00	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Kec.Nagreg	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	Dokumen	200.000.000	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec.Nagreg	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**1 Laporan**	51.000.000,00	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	Kec.Nagreg	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	2 Laporan	200.000	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	100%	-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	**200%**	**200.000**	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 LK	21.000.000,00	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4 LK	**10.000.000**	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 LK		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 LK	**10.000.000**	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 aporan		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2 aporan	5.000.000	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa		30.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Nagreg	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	5000000	

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakiklan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Soial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur.

Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten

Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulakan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbangbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan.

Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan

Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait.

Adapaun usulan Musrenbang sebagai berikut

1. Usulan Seluruh Desa (DSP) : 281 Usulan
2. Usulan Yang yang dilajutkan : 67 Usulan
3. Usulan Yang ditolak (tidak dilajutkan) : 214 Usulan

Usulan tersebut dipilah tidak masuk pada Renstra dan Renja tetapi usulan dari Desa di olah melalui Musyawarah Pembangunan di Kecamatan dan disulkan melalui Dinas teknis untuk disetujui masuk dalam Renja Dinas teknis atau tidak dibiayai dari DPA Kecamatan sehingga dipilah masuk dalam Renja Dinas/badan untuk masuk dalam RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025, dan usulan tersebut berdasarkan masalah Daerah Kabupaten yang ada di Desa desa di Kecamatan Nagreg

BAB III
TUJUAN, DAN SASARAN KECAMATAN NAGREG

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Bandung dalam rangka memberikan kontribusi terhadap standar penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik pada penyelenggaran Pemerintahan, baik Pusat dan Daerah.

Peranan Kecamatan sangat Strategis, yaitu OPD yang menerapkan kebijakan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Tugas dan penyelengaraan fungsi sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitas, penetapan,penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan;

Yang akan menjadi telaahan dan acuan bagi Kecamatan Nagreg yang meupakan bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten Bandung, sebagai landasan kebijakannya adalah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan Visi dan Misi disesuikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan itu sendiri.

Arah Kebijakan Kabupaten Bandung
Berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021 - 2026
Sesuai dengan Misi yang diemban Kecamatan

Tujuan		Sasaran RPJMD		Strategi		Arah Kebijakan	
Misii :	***Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera***						
Visi No 4 :	***Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan***						
4.1	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kinerja kelembagaan	4.1.1	Meningkatnya kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata	4.1.1.1	Meningkatkan kepuasan masyarakat akan kualitas pelayanan publik	a	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan

	dalam pelayanan publik		kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik				publik
				4.1.1.2	Peningkatan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah	a	Optimalisasi kinerja perangkat daerah dalam pencapaian pembangunan
						b	Pembentukan BUMD serta peningkatan akuntabilitas kinerja BUMD
				4.1.1.3	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip	a	Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan arsip
				4.1.1.4	Optimalisasi sistem pengawasan internal Pemerintah Daerah	a	Peningkatan kapasitas APIP
				4.1.1.5	Peningkatan kualitas sistem manajemen ASN	a	Peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ASN
				4.1.1.6	Peningkatan sarana dan prasarana penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik	a	Digitalisasi sistem penyelenggaraan pemerintahan
		4.1.2	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	4.1.2.1	Meningkatkan kemandirian fiska	a	Optimalisasi potensi sumber-sumber pendapatan
				4.1.2.2	Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	a	Penguatan kapasitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah
4.2	Menciptakan stabilitas	4.2.1	Meningkatkan ketertiban umum	4.2.1.1	Peningkatan kedisiplinan	a	Menciptakan masyarakat yang

	lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif		dan perlindungan masyarakat		masyarakat dalam hidup bermasyarakat		disiplin dan harmonis
				4.2.1.2	Peningkatan kesadaran keamanan di lingkungan masyarakat		Pembinaan kesadaran keamanan untuk masyarakat pada skala lingkungan

Dengan Visi " Terwujudnya Msyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera" Kecamatan Nagreg harus berkontribusi terhadap tercapainya Visi tersebut dengan mengemban Tugas Misi No 4 " Mengoptimalkan Tata kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan Masyarakat yang berlandaskan Nilai – nilai Kegamaan,

Kecamatan Nagreg sebagai bagian dari Perangkat Daerah di Kabupaten bandung dalam melaksanakan kebijakannya tidak terlepas dari Renstra dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung dengan Sasaran RPJMD Kabupatenm Bandung Tahun 2021 – 2026 Meningkatnya kualitas e-goverment melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan arah Kebijakan Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik.

Guna mensukseskan kebijakan sebagaimana dalam RPJMD , selain melaksanakan Kegiatan yang bersipat Atributif dan Delegatif sebagai pemegang mandatori Kewenangan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati Kepada Camat, selain membawa Misi No 4, Kecamatan Nagreg harus memberikan kontribusi terhadap capaian misi lainnya dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat mendorong atau memfasilitasi, mengkoordinasikan aspek kewilayahan untuk mendukung Dinas/Instansi lain dalam menjalan Program Kegiatan di wsilayah Kecamatan Nagreg

Fasilitasi dan Koordinasi terutama terhadap bidang Pendidikan, Kesehatan dan Program Pembangunan lainnya dengan tuijuan mendorong terhadap capaian IPM Kecamatan Nagreg guna berkontribusi capaian IPM Kabupaten Bandung

Untuk menmendukung terhadap Kinerja pelayanam Publ;ik, Kecamatan dituntut untuk melakukan Inovasi diberbagai bidang terutama sesuai dengan tugas dan fungsinya agar layanan publik dapat berjalan secara efektif dan epesien.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Kabupaten Bandung, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah, sehingga Tujuan merupakan hal yang sangat Penting dalam perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terdapat arah yang jelas dan terukur serta memberikan parameter terhadap capaian Kinerja Perangkat Daerah.

1. **Prioritas Pembangunan Tahun 2025**

Dalam upaya memberikan kontribusi terhadap capaian Visi dan Misi, OPD Kecamatan secara bersama melaksanakan Misi dari Kabupaten Bandung dan kaitan dengan misi tersebut Kecamatan Nagreg melaksanakan Program dan Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran yang berkorelasi dan berorioentasi pada Visi dan Misi Kabupaten bandung sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpegang pada ketentuan perundang – undangan sebagai Pelaksanaan tugas Atributif dan Delegatif sebagai kewenangan mandatori dari Bupati Kepada Camat.

A. Tujuan

Tujuan Perangkat Daerah Kecamatan Nagreg dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan adalah

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Dengan Tujuan tersebut Kecamatan Nagreg sebagai bagian dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tugas dan fungsinya dituntut harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan roda p[emerintahan di tingkat Kecamatan diwujudkan dengan Akuntabilitas melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang diwujudkan adanya komitmen seluruh jajaran di Kecamatan untuk berkinerja dengan baik dengan Perjanjian Kinerja, dan untuk m,engevaluasi terhadap kinerja aparatur tersebut perlu dilakuan pengukuran Kinerja dengan acuan target capaian Kinerja sebagaimana Perencanaan dalam Renstra dan Renja.

Tata kelola pemerintahan sebagaimana Tujuannya harus dapat dilaporkan Kinerjanya melalui LKIP yang harus sisusun setiap tahun dengan data yang bersumber dari hasil kinerja masing – masing unit kerja yang ada di kecamatan.

2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan layanan Publik di Kecamatan adalah merupakan hal harus disikapi dan dilaksanbakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupatiu Bandung Nomor 110 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.

Selain Layanan Publik berupa Kegiatan Pelayanan Publik Paten guna pelayanan Administrasi yang dibutuhkan Masyarakat, Kecamatan harus melaksanakan Program dan Kegiatan guna peninmgkatan melalui Peningkatan pelaksaan Program dan Kegiatan serta melakukan P[embinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa agar Pelaksanaan Tata kelola pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pembangunan dapat berjalan dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang berlaku..

Guna terwujudnya pelayanan yang baik, Kecamatan Nagreg dengan Visi Pelayanan : Terwujudnya Pelayanan yang Cepat, Efektif, Responsif, Dinamis, Akurat, dan Santun**,** **(Motto NAGREG CERDAS**) ditunjang dengan Misi Pelayanan

1. Mewudkan Pelayanan Cepat (sesuai dengan SOP)
2. Meningkatkan Pelayanan yang efektif (Selesai sesuai Ketentuan)
3. Meningkatkan Pelayanan yang Responsif

4. Meningkatkan Pel;ayanan yang Dinamis (Tanggap dan cepat terhadap kondisi yang ada)
5. Meningkatnya Pelayanan yang Akurat
6. Mewujudkan Aparatur yang santun dalam melayani

B. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan

Sasaran – sasaran tersebut dilaksanakan setiap tahun melaui Rencana Kerja sebagai penjabaran dari Rencana Strategis.

Adapun Sasaran Renja Kecamatan Nagreg :

1. Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik
2. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan
3. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

Untuk mencapai Sasaran tersebut Camat Nagreg telah mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi dan Monitoring evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dengan Monitooring dan Evaluasi internal tersebut diharapkan Kinerja Kecamatan Nagreg dapat terkoordinasi dengan baik dan berjalan sesuai dengan perencanaan guna pencapaian Target Kinerja dan Pengelolaan Keuangan yang dalam Penyerapannya dapat secara maksimal dan optimal dalam pelaksanaan Program dan Kegiatannya

Selain Monitoring dan Evaluasi Internal, Camat Nagreg telah melakukan upaya penegakan Disiplin aparatur dan terus meningkatkan koordinasi guna membangunan soliditas Kinerja Pembangunan di kecamatan nagreg.

Tujuan, Sasaran dan Indilator Kinerja Utama Kecamatan Nagreg Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Tahun 2024
1	***Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah***	Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik	1. Nilai AKIP	74
			2. BMD dalam Keadaan baik	73
2	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	1. Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik dan tata kelola pemerintahan	Nilai IKM	90
		2. Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Juamlah Desa cepat berkembang	8 Desa

Tabel 3.3
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NAGREG TAHUN 2025

No	Tujuan	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator			Keterangan
				Outcome Ultimate	Outcome Intermedite	Output	
1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**Meningkatnya Kualitas kinerja Aparatur dan Penyelenggaran Pelayan Publik**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai AKIP**			
1.1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang trasparan dan akuntabel**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu**		
1.1.1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	meningkatkan kualitas Dokumen Perencanaan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
1.1.3	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
1.1.4		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen perubahanDPA-SKPD	
1.1.5	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

		terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
1.1.6		Tersedianya data Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	
1.2	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**Meningkatnta Tata Kelola Adnistrasi Keuangan Daerah**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu**		
1.2.1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Terlaksanya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
1.3	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**Meningkatkan tata kelola Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		**persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu**		
1.3.1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	meningkatnya Kapasitas SDM dan Disiplin Aparatur	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
1.4	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	**meningkatnya tata kelola Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal**		
1.4.1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor yangDisediakan	

1.4.2	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
1.4.3	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
		Tersedianya bahan logistic Knator	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1.4.4	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	
1.4.5	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakanjumlah surat kabar dan tabloit	
1.4.6	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
1.4.7	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
1.5	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Meningkatnya Pengadaan Barang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
1.5.1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Meningkatnya Ketersediaan Meubeul Kantor	Pengadaan Mebel			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
1.5.2	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Meningkatnya Ketersediaan Peralatan dan mein lainnya.	pengadaan peralatan dan mesin lainnya			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
1.6	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		
1.6.1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.6.2	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang DisediakanJumlah Orang bekerja/Bulan	
1.7	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**Persentase BMD dalam Kondisi Baik**		

1.7.1	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
		Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1.7.2	**Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah**	terlaksannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			JJumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
2	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)**			
2.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**		
2.1.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Meningkatnya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum			Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
2.2	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**meningkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan		
2.2.3	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Menungkatnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang DilimpahkanJumlah Jenis Urusan	
3	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dibina**			
3.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa**		
3.1.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	

3.1.2	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
3.2	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**		**persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi**		
3.2.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Meningkatnya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	
3.2.2	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
3.2.3	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
4	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Trantiibum	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum			
4.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	meningkatnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**		
4.1.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Terlaknanya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
4.1.2	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh MasyarakatJumlah Kegiatan	
5	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Meningkatnya Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase capaian Keberhasilan Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**			
5.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		

5.1.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	
5.1.2	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	meningkatnya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
6	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**			
6.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	**meningkatnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**persentase desa yang dibina**		
6.1.1	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
6.1.2	**Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dalam Pelaksaaan Kebijakan dan Program senantiasa memperhatikan Visi dan Misi Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026

Guna peningkatan pelaksanaan Tugas Pemerintahan Umum dan Peningkatan Kwalitas Pelayanan Publik, maka Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mengacu pada permendagri 90 Tahun 2019 dan disusun berdasarkan pertimbangan bahwa program/kegiatan/Sub Kegiatan diarahkan untuk suksesnya pencapaian dari Misi yang diemban oleh Kecamatan Nagreg

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Visi dan Misi Kabupaten Bandung, Kecamatan Nagreg dalam perencanaan Tahun 2025 akan melaksanakan program secara efekltif dan efesien

Sebagai acuan dan gambaran mengenai Perencanaan Tahun 2025 dengan target capaian yang harus menjadi acuan bagi aparatur Kecamatan Nagreg dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel 3.2 adalah merupakan suatu agenda Kerja Pemerintah Kecamatan Nagreg pada Tahun 2025 yang tentunya harus disusun pula pengendalian terhadap berbagai resiko yang akan muncul dalam pelaksanaan Program dan kegiatan, sehingga Camat beserta Jajaran struktural sampai pada tingkat Stap harus melakukan sebuah perjanjian Kinerja guna menjamin pelaksanaan program dan kegiatan berjalan lancar.

TC. 33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Bandung

OPD : Kecamatan Nagreg

Kode Rekening						Urusan/Bidang/Kegiatan Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
						KECAMATAN								
						KECAMATAN NAGREG				**6.246.641.599**				
1	7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akip**	**Kec.Nagreg**	**78**	**5.739.261.899**	**APBD Kab**		**77 Point**	**4.775.259.392,00**
	7	01	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Peresentase pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec.Nagreg**	**100%**	**46.806.000**	**APBD Kab**		**100%**	**13.000.000,00**
	7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	1 Dokumen	17.726.000	APBD Kab		1 Dokumen	7.000.000,00
	7	01	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec.Nagreg	1 Dokumen	17.180.000	APBD Kab		1 Dokumen	1.500.000,00
	7	01	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec.Nagreg	1 Dokumen	3.000.000	APBD Kab		1 Dokumen	1.500.000,00

	7	01	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec.Nagreg	1 Dokumen	2.150.000	APBD Kab		1 Dokumen	-
	7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Nagreg	1 Dokumen	2.150.000	APBD Kab		1 Laporan	1.000.000,00
	7	01	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec.Nagreg	1 Laporan	2.300.000	APBD Kab			1.000.000,00
	7	01	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kec.Nagreg	1 Laporan	2.300.000	APBD Kab			1.000.000,00
	7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec.Nagreg**	**100%**	**4.755.663.703**	**APBD Kab**		**100%**	**4.179.332.524,00**
	7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec.Nagreg	26 Org/Bulan	4.749.183.703	APBD Kab		24 Orang/bulan	4.178.332.524,00
	7	01	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec.Nagreg	1 Laporan	2.500.000	APBD Kab		1 Laporan	-
	7	01	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec.Nagreg	1 Laporan	1.990.000	APBD Kab		1 Laporan	1.000.000,00

	7	01	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec.Nagreg	1 Dokumen	1.990.000	APBD Kab		1 Dokumen	-
	7	**01**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kec.Nagreg**	**100%**	**41.635.328**	**APBD Kab**		**100%**	**10.000.000,00**
	7	01	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec.Nagreg	37 paket	41.635.328	APBD Kab		24 Orang	10.000.000,00
	7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi Umum yang maksimal**	**Kec.Nagreg**	**37 Orang**	**101.230.000**	**APBD Kab**		**100%**	**105.000.000,00**
	7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec.Nagreg	100%	5.000.000	APBD Kab		1 Paket	5.000.000,00
	7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec.Nagreg	17 paket	15.000.000	APBD Kab		1 Paket	15.000.000,00
	7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kec.Nagreg	47 paket	5.000.000	APBD Kab		1 Paket	5.000.000,00
	7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec.Nagreg	10 paket	5.000.000	APBD Kab			2.000.000,00
	7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec.Nagreg	Paket	10.000.000	APBD Kab		1 Paket	10.000.000,00
	7	01	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kec.Nagreg	13 paket	10.000.000	APBD Kab		1 Dokumen	5.000.000,00
	7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec.Nagreg	3 dokumen	5.000.000	APBD Kab		1 Laporan	3.000.000,00

	7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec.Nagreg	Laporan	46.230.000	APBD Kab		167 Laporan	60.000.000,00
	7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Nagreg**	**8 Lap 167 Lap**	**121.000.000**	**APBD Kab**		**1000**	**35.000.000,00**
	7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			58.000.000			1 Unit	10.000.000,00
	7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Nagreg	100%	63.000.000	APBD Kab		3 Unit	25.000.000,00
	7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec.Nagreg**	**Unit**	**434.926.868**	**APBD Kab**		**100%**	**369.926.868,00**
	7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec.Nagreg	Unit	35.000.000	APBD Kab		12 Laporan	20.000.000,00
	7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec.Nagreg	1 Paket	399.926.868	APBD Kab		11 Laporan	349.926.868,00
	7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Prosentase Pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik daerah**	**Kec.Nagreg**	**7 nit**	**238.000.000**	**APBD Kab**		**100%**	**63.000.000,00**
	7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec.Nagreg		35.000.000	APBD Kab		6 Unit	20.000.000,00
	7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec.Nagreg	Unit	3.000.000	APBD Kab		2 Unit	3.000.000,00

	7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec.Nagreg	Unit	200.000.000	APBD Kab		1 Unit	40.000.000,00
									Jumlah I					**4.775.259.392,00**
2	**7**	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**	**Kec.Nagreg**	**90,20 Point**	**470.269.700**	**APBD Kab**		**89 Persen**	**205.000.000,00**
	7	**01**	**02**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Kec.Nagreg**	**Laporan**	**3.640.000**	**APBD Kab**		**100%**	**5.000.000,00**
	7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec.Nagreg	12 laporan	3.640.000	APBD Kab		1 Dokumen	5.000.000,00
	7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang ada di Kecamatan**	**Kec.Nagreg**		**466.629.700**	**APBD Kab**		**100%**	**200.000.000,00**
	7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Nagreg	11 Laporan	466.629.700	APBD Kab		1 Laporan	200.000.000,00
3	**7**	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase capaian Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**Kec.Nagreg**	**100%**	**159.075.300**	**APBD Kab**		**100 Persen**	**55.000.000,00**
	7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Kec.Nagreg**	**5 unit**	**77.280.000**	**APBD Kab**		**100%**	**10.000.000,00**

	7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec.Nagreg	Unit	3.640.000	APBD Kab		1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00
	7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	Unit	73.640.000	APBD Kab		1 Laporan	5.000.000,00
	7	**01**	**03**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyararakat Tingkat Kecamatan**	**Kec.Nagreg**	**6 unit**	**33.255.300**	**APBD Kab**		**100%**	**35.000.000,00**
	7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kec.Nagreg		4.150.000	APBD Kab		1 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00
	7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kec.Nagreg		9.955.300	APBD Kab		1 Lembaga Kemasyarakatan	10.000.000,00
	7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec.Nagreg		9.150.000			1 Laporan	10.000.000,00
	7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec.Nagreg	84%	10.000.000	APBD Kab		1 Laporan	10.000.000,00
	7	**01**	**03**	**2.06**		**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**Kec.Nagreg**	**%**	**48.540.000**	**APBD Kab**		**100%**	**10.000.000,00**
	7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kec.Nagreg	Laporan	3.640.000	APBD Kab			1.000.000,00

	7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kec.Nagreg	Dokumen	10.000.000	APBD Kab			1.000.000,00
	7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kec.Nagreg	%	8.300.000	APBD Kab			2.000.000,00
	7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kec.Nagreg	Dokumen	10.000.000	APBD Kab			2.000.000,00
	7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec.Nagreg	Laporan	8.300.000	APBD Kab			2.000.000,00
	7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec.Nagreg	Laporan	8.300.000	APBD Kab			2.000.000,00
4	**7**	**01**	**04**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Kec.Nagreg**	**100%**	**28.200.000**	**APBD Kab**		**100 Persen**	**35.000.000,00**
	7	**01**	**04**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**Kec.Nagreg**	**1 Dokumen**	**20.750.000**	**APBD Kab**		**1000**	**25.000.000,00**

	7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec.Nagreg	100%	4.150.000	APBD Kab		1 Laporan	5.000.000,00
	7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec.Nagreg	1 Dokumen	16.600.000	APBD Kab		1 Laporan	20.000.000,00
0	**7**	**01**	**04**	**2.02**		**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Persentase Peneraapan dan Penegakan Peraturan Daerah dab Peraturan Kepala Daerah**	**Kec.Nagreg**	**1 Laporan**	**7.450.000**	**APBD Kab**		**100%**	**10.000.000,00**
	7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec.Nagreg	2 laporan	7.450.000	APBD Kab		1 Laporan	10.000.000,00
5	**7**	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase capaian Pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan kepala daerah**	**Kec.Nagreg**		**79.000.000**			**100 Persen**	**44.000.000,00**
	7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Persentase pelaksanaan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec.Nagreg**	**100%**	**79.000.000**	**APBD Kab**		**100%**	**44.000.000,00**

	7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec.Nagreg	100%	54.000.000	APBD Kab		150 Orang	24.000.000,00
	7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Nagreg	6 LK	25.000.000	APBD Kab		1 Dokumen	20.000.000,00
6	**7**	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang dibina dan diawasi**	**Kec.Nagreg**	**Dokumen**	**47.430.000**	**APBD Kab**		**100 Persen**	**45.000.000,00**
	7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase Pelaksanaan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec.Nagreg**	**1 Laporan**	**47.430.000**	**APBD Kab**		**100%**	**45.000.000,00**
	7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec.Nagreg	100%		APBD Kab		1 Dokumen	6.000.000,00
	7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Nagreg	4 LK	19.300.000	APBD Kab		1 Dokumen	5.000.000,00
	7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec.Nagreg	5 LK		APBD Kab		1 Dokumen	5.000.000,00

	7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Nagreg	1 aporan		APBD Kab		1 Dokumen	4.000.000,00
	7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec.Nagreg		28.130.000			1 Dokumen	25.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN NAGREG

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Nagreg Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dari program perangkat daerah Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2026 disajikan pada tabel 3.2. di BAB III (pada halaman sebelumnya)

Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban

Tabel 4.1

Program dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Pendanaan (Rp)
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**5.739.263.898,56**
1.1	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**46.806.000,00**

1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.726.000,00
1.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.180.000,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	2.150.000,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.150.000,00
1.1.6	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2.300.000,00
1.1.7	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	2.300.000,00
1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4.755.665.702,56**
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.749.185.702,56
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.500.000,00
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	1.990.000,00
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.990.000,00
1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**41.635.328,00**
1.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	41.635.328,00
1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**101.230.000,00**
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000,00
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000,00
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.000.000,00
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000,00
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000,00
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	46.230.000,00
1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**121.000.000,00**
1.5.1	Pengadaan Mebel	58.000.000,00
1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	63.000.000,00
1.6	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**434.926.868,00**
1.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.000.000,00
1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	399.926.868,00
1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**238.000.000,00**
1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.000.000,00
1.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.000.000,00
1.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**358.859.700,00**
2.1	**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**3.640.000,00**
2.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	3.640.000,00
2.2	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**355.219.700,00**

2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	355.219.700,00
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**139.880.600,00**
3.1	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**57.280.000,00**
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.640.000,00
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	53.640.000,00
3.2	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**34.060.600,00**
3.2.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	4.150.000,00
3.2.2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	9.955.300,00
3.2.3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	9.955.300,00
3.2.4	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000,00
3.3	**Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan**	**48.540.000,00**
3.3.1	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	3.640.000,00
3.3.2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10.000.000,00
3.3.3	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	8.300.000,00
3.3.4	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10.000.000,00
3.3.5	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	8.300.000,00
3.3.6	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	8.300.000,00
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**28.200.000,00**
4.1	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**20.750.000,00**
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4.150.000,00
4.1.2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	16.600.000,00
4.2	**Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**7.450.000,00**
4.2.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	7.450.000,00
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**70.030.000,00**
5.1	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**70.030.000,00**
5.1.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	54.000.000,00
5.1.2	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16.030.000,00
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**47.430.000,00**
6.1	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**47.430.000,00**
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0,00

6.1.2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19.300.000,00
6.1.3	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0,00
6.1.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	0,00
6.1.5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	28.130.000,00

BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan dokumen Rancangan perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rencana kerja Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada kebutuhan dan Pertimbangan lain berdasarkan pengalaman atau history pada tahun 2024 dengan demikian ada keselarasan antara prioritas kabupaten dengan prioritas Kecamatan Nagreg maupun nasional. Rencana awal ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Nagreg dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025, hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai ujuan OPD :

1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan aparat serta sumber daya yang ada
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis

Dengan komitmen dan sinergitas aparatur di lingkungan Kantor Kecamatan Nagreg dan pelaksanaan evaluasi serta monitoring intern secara rutin dan terus menerus dihapkan dapat meningkatkan kinerja yang optimal dalam rangka mewujudkan target kinerja sesuai dengan target capaian kinerja dan memberikan kontribusi terhadap kinerja pencapaian visi Kabupaten Bandung.

Plt. Camat Nagreg

TTD

DINDIN HIKMAT WAHIDIN, S.E,.M.K.P
NIP. 19700205 199003 1 004

BUPATI BANDUNG

TTD

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA